



**LAPORAN
PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DAERAH (LP2KD)
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT TKPKD
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Bimbingan_Nya, sehingga penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan di Kabupaten Sikka. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka Tahun 2022, dengan Keputusan Bupati Nomor 131/HK/2023. Salah satu tugas TKPK Kabupaten Sikka adalah sebagai penyusun LP2KD. Dalam

laporan ini memuat kelembagaan, capaian dan analisis masalah kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan.

Akhirnya, semoga LP2KD Kabupaten Sikka Tahun 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka guna terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka Bahagia.

Maumere, Agustus 2023

Wakil Bupati Sikka, /



ROMANUS WOGA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6
2.1. Struktur, Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	6
2.2. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan	7
2.3. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	8
2.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	9
2.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan	9
BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS	11
3.1. Persentase Penduduk Miskin	11
3.2. Jumlah Penduduk Miskin	12
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	15
3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	16
3.5. Garis Kemiskinan	17
3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan	18
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	40
BAB V PENUTUP	42
5.1. Kesimpulan	42
5.2. Rekomendasi	42

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Perangkat Daerah dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	7
Tabel 3.1. Sebaran Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Sikka	14
Tabel 3.2. Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sikka	19



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2022	11
Grafik 3.2. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	12
Grafik 3.3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2022	13
Grafik 3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2022	15
Grafik 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2022	16
Grafik 3.5. Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2022	17



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1. Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka	6
--	---



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2023**

BAB I



PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Maksud dan Tujuan**
- 1.3. Landasan Hukum**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program serta pembuatan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD), telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka Tahun 2023, sesuai Keputusan Bupati

Sikka Nomor : 131/HK/2023. Tugas Tim tersebut adalah memberikan dukungan administrasi teknis, memberikan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi daerah, agenda kerja tahunan serta bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.

TKPKD Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan dapat tercapai.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sikka Tahun 2023 disusun dengan maksud :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPKD Kabupaten Sikka dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2022;
2. Memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2022;
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Memberikan gambaran harapan yang akan datang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) adalah :

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sikka;

3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 64).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 2.2. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan

BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS

- 3.1. Presentase Penduduk Miskin
- 3.2. Jumlah Penduduk Miskin
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan
- 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan
- 3.5. Garis Kemiskinan

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

BAB V PENUTUP



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2023**

BAB II



KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Struktur, Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.2 Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.3. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat**
- 2.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan**

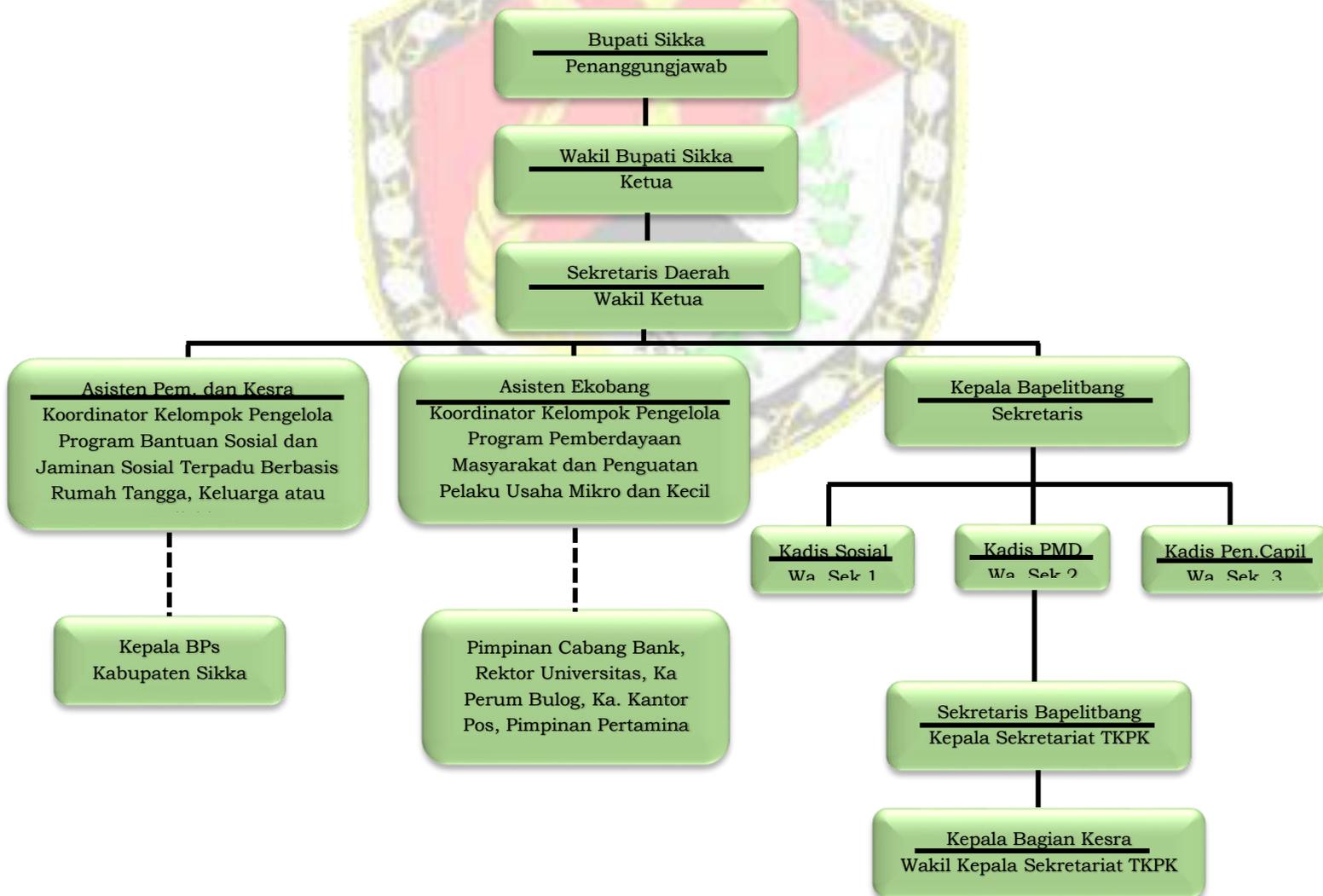
BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

21. STRUKTUR FUNGSI DAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka, sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 131/HK/2023, dapat dilihat pada bagan 2.1.

Bagan 2.1.
Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka



Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengadaan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan dukungan administrasi teknis;
2. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.

22 ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp193.186.582.786.

Anggaran tersebut melalui intervensi Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Daftar Perangkat Daerah dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43.152.088.400
2.	Dinas Kesehatan	75.601.789.130
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.652.795.482

4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	18.629.641.600
5.	Dinas Sosial	2.558.113.200
6.	Dinas Ketahanan Pangan	258.993.774
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	641.324.700
8.	Dinas Perhubungan	51.286.500
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	640.550.000
JUMLAH		193.186.582.786

23. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka yaitu :

1. Data kemiskinan belum valid yang menyebabkan tidak tepat sasaran pemberian bantuan.
2. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan usaha yang berhenti sehingga lapangan kerja dan akses sumber pendapatan bagi masyarakat miskin tertutup.
3. Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai.
2. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.
Sebagian kecil masyarakat Kabupaten Sikka khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin,

sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari Pemerintah.

3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode tertentu agar didapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.
4. Pandemi Covid-19. Kondisi ini rentan bertambahnya penduduk miskin karena lapangan pekerjaan terbatas, pendapatan turun drastis, dan lapangan usaha tidak mudah di akses.
5. Kurang optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

24. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Penanganan Pengaduan Masyarakat dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kepedulian dan pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui tingkat desa hingga kabupaten, namun sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka belum membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (TPK Desa/Kelurahan).

25. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian program, kegiatan, dan kebijakan yang telah disepakati.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Obyektif dan Profesional;
2. Transparan;

3. Partisipatif;
4. Akuntabel;
5. Tepat Waktu;
6. Berkesinambungan;
7. Berbasis Indikator Kinerja;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Sikka terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen-Dokumen Perencanaan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.
 - d. Pada tahap ini, TKPKD Kabupaten Sikka dan Perangkat Daerah akan mengevaluasi dan mensinkronisasi dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa program-program kemiskinan yang tercantum pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sikka terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan.
2. Monitoring dan Evaluasi Program Kemiskinan
Dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :
 - ✓ Dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya yang dilakukan secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (tematik).
 - ✓ Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program.
 - ✓ Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan pada Wakil Bupati.
3. Tidak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program percepatan.



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2023**

BAB III



CAPAIAN DAN ANALISIS

- 3.1. Persentase Penduduk Miskin**
- 3.2. Jumlah Penduduk Miskin**
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan**
- 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan**
- 3.5. Garis Kemiskinan**
- 3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan**

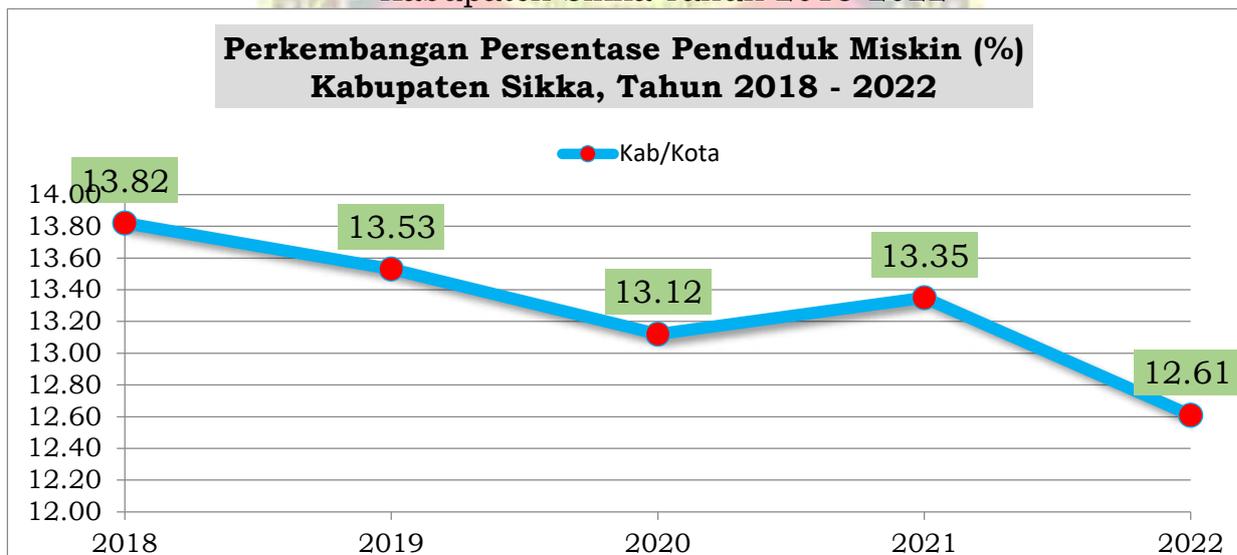
BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS

3.1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka selama 5 Tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022



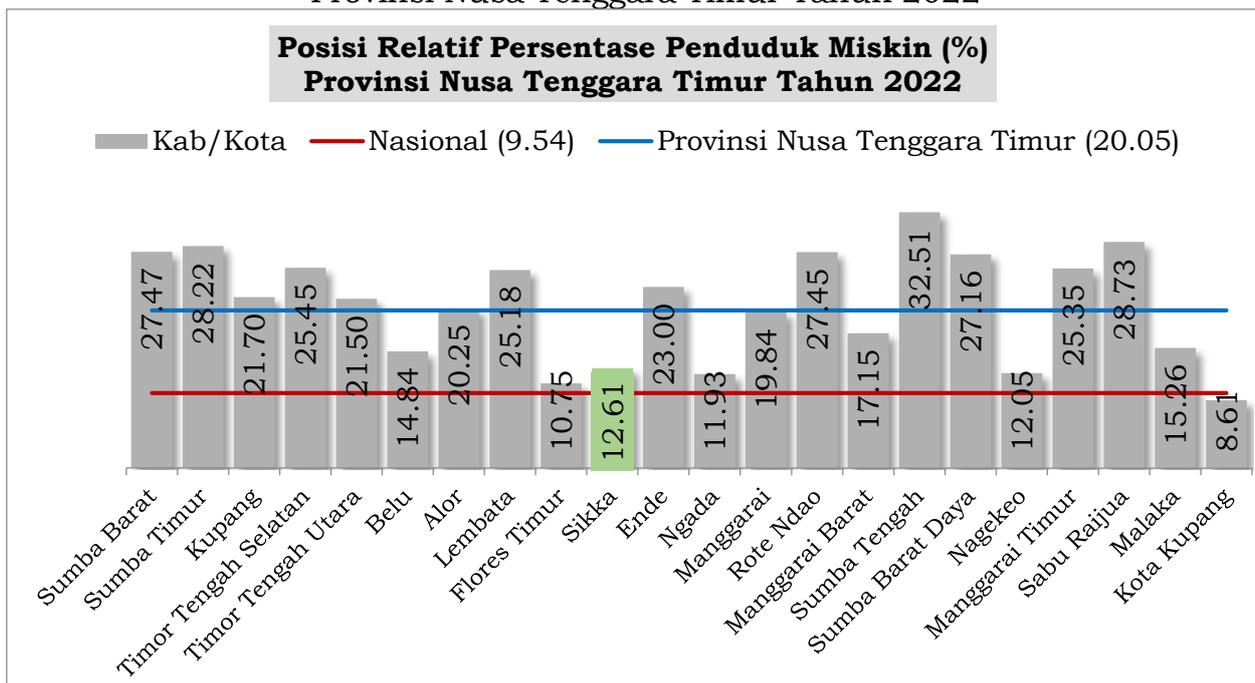
Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Grafik 3.1 menunjukan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami trend penurunan, namun jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 910 jiwa, terjadi pada tahun 2021.

Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka mengalami penurunan sekitar 2.220 jiwa menjadi 40.870 jiwa atau 12,61% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yaitu sebanyak 43.090 jiwa atau 13,35%.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, posisi relatif persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka sebesar 12,61% berada dibawah Kabupaten Ende yaitu sebesar 23%, dan berada di atas Kabupaten Flores Timur sebesar 10,75%. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Posisi relatif persentase penduduk miskin
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Grafik 3.2 menunjukkan rata-rata posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yaitu sebesar 12,61% berada diatas secara nasional sebesar 9,54%, dan berada dibawah provinsi sebesar 20,05%.

3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebanyak 40.870 jiwa. Jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat di lihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka
Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Dari grafik diatas dapat digambarkan pada Tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.220 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebanyak 40.870 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur sebanyak 28.080 jiwa dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende sebanyak 63.400 jiwa. Jika dibandingkan dengan kedua Kabupaten ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka lebih kecil dari pada Kabupaten Ende namun lebih besar dari Kabupaten Flores Timur.

Pada Tahun 2021, rata-rata jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.131.620 jiwa, dan nasional sebanyak 26.161.160 jiwa. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi NTT, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka lebih kecil dari rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi NTT, namun lebih besar jika dibandingkan secara nasional.

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah Kepala Keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Sikka sebanyak 23.070 KK, dengan Desil 1 sebanyak 9.838 KK, Desil 2 sebanyak 8.591 KK dan Desil 3 sebanyak 4.641 KK, sedangkan jumlah individu miskin ekstrem sebanyak 105.814 Jiwa, dengan Desil 1 sebanyak 50.534 jiwa, Desil 2 sebanyak

36.989 jiwa, dan Desil 3 sebanyak 18.291 jiwa. Sebaran penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sebaran penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Total
1.	Alok	1.386	2.075	1.383	4.844
2.	Alok Barat	1.840	2.269	1.457	5.566
3.	Alok Timur	1.828	2.148	1.177	5.153
4.	Bola	2.891	1.757	749	5.397
5.	Doreng	3.967	1.750	666	6.383
6.	Hewokloang	2.874	1.808	769	5.451
7.	Kangae	2.886	2.518	1.193	6.597
8.	Kewapante	2.003	1.797	780	4.580
9.	Koting	287	463	331	1.081
10.	Lela	2.052	1.646	825	4.523
11.	Magepanda	1.550	1.186	612	3.348
12.	Mapitara	2.487	1.131	392	4.010
13.	Mego	1.637	771	366	2.774
14.	Nelle	477	790	544	1.811
15.	Nita	3.593	3.514	1.798	8.905
16.	Paga	1.868	2.032	1.024	4.924
17.	Palue	1.032	516	187	1.735
18.	Talibura	5.982	3.883	1.847	11.712
19.	Tanawawo	2.785	1.233	493	4.511
20.	Waiblama	2.875	1.428	512	4.815
21.	Waigete	4.234	2.274	1.186	7.694
Total		50.534	36.989	18.291	105.814

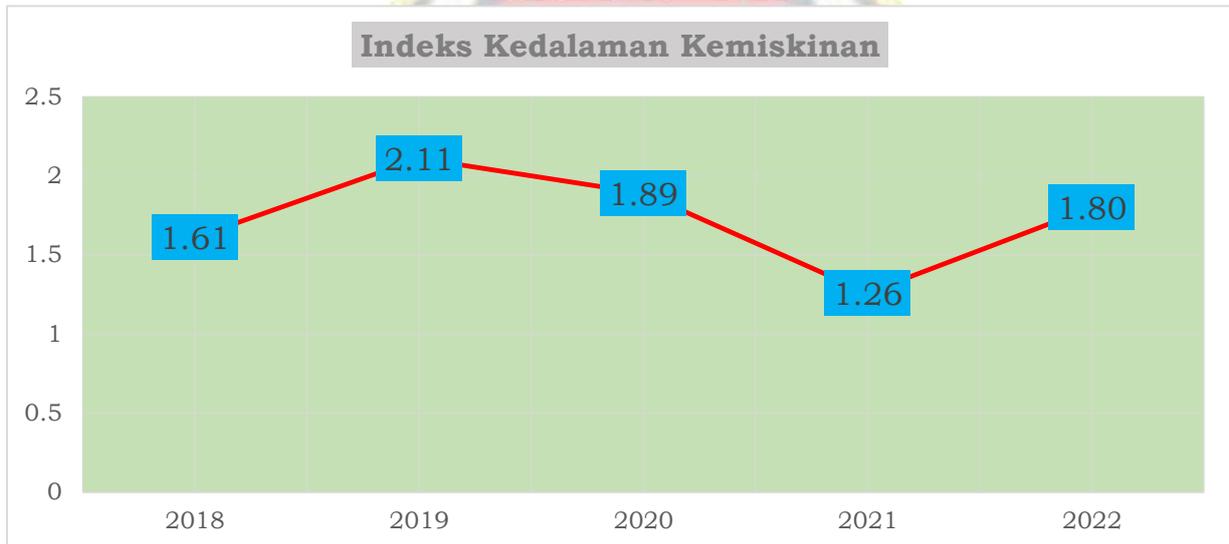
Sumber : Kemenko PMK (diolah), 2022

Terhadap data pada tabel 3.1, sampai pada saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi terhadap *exclusion error*/orang miskin yang seharusnya terdata tapi tidak terdata dalam data P3KE dan *inclusion error*/orang yang seharusnya tidak terdata dalam data P3KE akan tetapi terdata.

3.3. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kemiskinan Kabupaten Sikka dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Grafik 2.4 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2021 sebesar 1,26 mengalami peningkatan sebesar 0,54 menjadi 1,80 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.4. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5
Indeks Keparahhan Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2018 – 2022



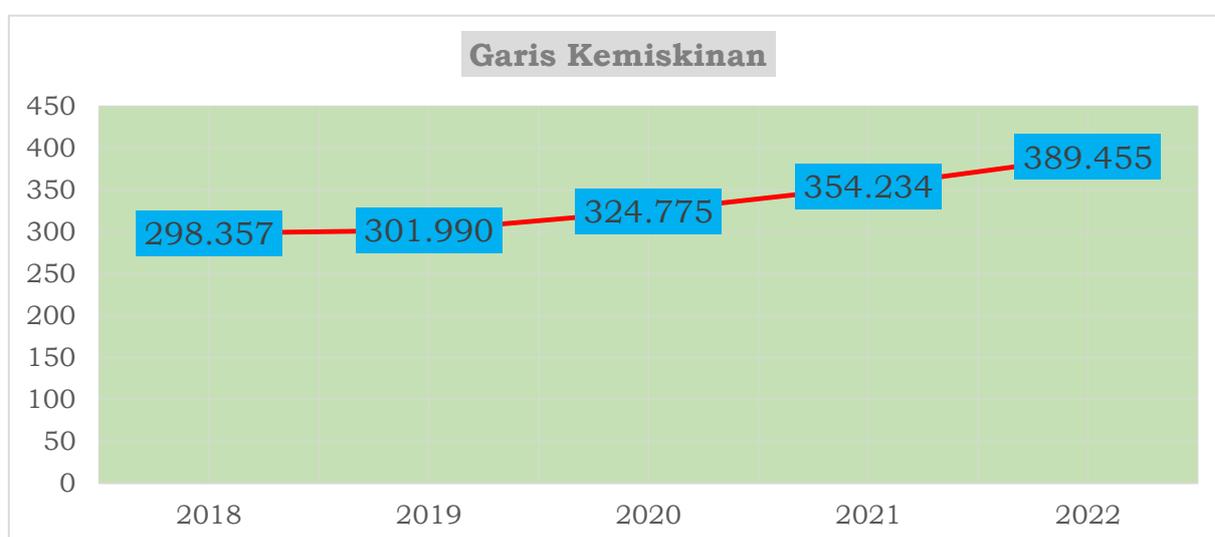
Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Grafik 2.5 menunjukkan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2021 sebesar 0,21 mengalami peningkatan sebesar 0,19 menjadi 0,40 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, yang dapat disebabkan oleh variasi pemberian bantuan oleh pemerintah.

3.5. GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan di Kabupaten Sikka dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebesar Rp389.455, hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp389.455. Penduduk di Kabupaten Sikka dikatakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

3.6. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemerintah Kabupaten Sikka terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program/kegiatan yang mendorong pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka.

Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Berbagai kebijakan diambil dalam upaya meminimalisir beban penduduk miskin yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2.

Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1.	PENDIDIKAN	Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendidikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah), HLS (Harapan Lama Sekolah)	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terseleksi Pengelolaan Pendidikan			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Pendidikan dan Olahraga
							Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			185.600.000		182.994.000	

No.	Urusan Pemerintah /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana/Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun		29 Unit	1.821.329.000	29 Unit	1.746.992.900	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat		50 Ruang	5.840.730.000	50 Ruang	5.319.102.862	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi		2 Ruang	76.472.000	2 Ruang	76.170.000	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun		29 Unit	1.543.663.400	29 Unit	1.401.006.700	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat		30 Ruang	3.995.772.000	30 Ruang	3.607.103.045	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS		100%	20.071.322.000	100%	20.027.513.911	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS		100%	9.567.200.000	100%	10.380.458.280	
							Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar		100%	50.000.000	100%	50.000.000	
2.	KESEHATAN	Peningkatan kualitas Kesehatan melalui efektivitas pemanfaatan anggaran untuk sarpras, penambahan dan pemerataan penyebaran tenaga Kesehatan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Kesehatan

Sekretariat TKPK
Kabupaten Sikka

No.	Urusan Pemerintah /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		dan swasta serta optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru												
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		7 Kegiatan	1.997.682.300	7 Kegiatan	1.770.657.905	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		7 Kegiatan	1.644.279.500	7 Kegiatan	1.310.769.000	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2 Kegiatan	414.497.100	2 Kegiatan	361.242.700	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1 Kegiatan	3.223.966.700	1 Kegiatan	2.903.171.900	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2 Kegiatan	895.2 81.20 0	2 Kegiatan	804.9 53.80 0	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		9 Kegiatan	366.1 52.90 0	9 Kegiatan	291.1 50.10 0	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1.061 .361. 800		1.012 .436. 500	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			242.1 86.10 0		230.0 56.70 0	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		164.798.700		154.869.300		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		632.239.900		564.758.800		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah orang terduga menderit tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5.843 Orang	718.291.500	5.559 Orang	628.945.600		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6.820 Orang	393.675.800	6.141 Orang	365.000.600		

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		9 Kegiatan	1.140.173.100	9 Kegiatan	998.381.600	
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		12 Dokumen	6.369.091.250	12 Dokumen	5.721.467.550	
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		48 Dokumen	56.338.111.280	48 Dokumen	43.475.223.667	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,	Meningkatkannya Ketersediaan Infrastruktur Dasar (IK : Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan/I KPU)	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKPU : Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terseleksi Anggaran Pengelolaan Sumber Daya Air			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan												
							Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun		1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	31.203.000	
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi		500 Meter	137.558.817	500 Meter	137.558.817	
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM		4.900 SR	51.483.236.665	2,371 SR	28.838.285.143	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								berbasis masyarakat						
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Meningkatkannya Kualitas Permukiman (IK : Indeks Kualitas Urusan Permukiman/IKUP)	IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Jumlah RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman		321 Unit	6.495.550.000	287 Unit	4.738.504.760	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki						
					PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terseleksi	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Wilayah Kabupaten Sikka					
							Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian		1. Sambungan Rumah Listrik PLN : 1.555 SR 2. Sambungan	12.134.091.600	1. Sambungan Rumah Listrik PLN : 1.581 SR 2. Sambungan	6.208.884.450	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
										ungan Ruma h Air Minu m Bersi h : 3 SR 3. Pekerj aan Jalan Lingk ungan : 2.787 M 4. Pemb ukaan Jalan Lingk ungan :1.348 M 5. Pekerj aan Salur an/Dr ainase : 139 M		Ruma h Air Minu m Bersih : 3 SR 3. Pekerj aan Jalan Lingk ungan : 3.623, 4 M 4. Pemb ukaan Jalan Lingk ungan :16.68 7M 5. Pekerj aan Salur an/Dr ainase : 209,3 M 6. Pekerj		

Sekretariat TKPK
Kabupaten Sikka

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
										6. Pekerjaan Turap : 269 M		aan Turap : 153,8 M		
										7. PLTS : 79 Unit		7. PLTS : 79 Unit		
										8. Pekerjaan Pagar : 194 M		8. Pekerjaan Pagar : 232 M		
										9. Bantuan Sarana Peningkatan Air : 252 Unit		9. Bantuan Sarana Peningkatan Air : 291 Unit		
5.	SOSIAL	Meningkatkan kualitas data untuk mengoptimalka	Meningkatnya Kualitas dan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos										Dinas Sosial

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		n perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Jangkauan Pelayanan Sosial (IK : Persentase Terlayani Kebutuhan (Akses & Jumlah)	untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar										
					PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersele nggaran ya Perlindungan dan Jamina n Sosial			Wilayah Kabupaten Sikka					
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota		3.872 KPM	2.558 .113.200	3.790 KPM	2.551 .142.349	
6.	PANGAN	Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan lokal yang memenuhi prinsip B2SA, mendukung produktivitas masyarakat	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan (IK : Persentase Penduduk di bawah garis	IKP (Indeks Ketahanan Pangan)	PENANGAN KERAWANAN PANGAN	Tersele nggaran ya Penangan an Kerawan an Pangan			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Ketahanan Pangan

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	kemiskinan, persentase Rumah Tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik)											
							Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	258.993.774	100%	255.573.524	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Daerah Kabupaten /Kota							
7.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tersedia Sarana dan Prasarana (IK : Indeks Sarana Prasarana)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	PENDAFTERAN PENDUDUK	Terseleksi Pendaftaran Penduduk			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan		100%	10.500.000	100%	10.500.000	

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							dengan Kebutuhan	kebutuhan yang tersedia						
					PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersele nggaran ya Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan			Wilayah Kabupaten Sikka					
							Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan		100%	518.985.200	53%	276.799.700	
							Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan		100%	111.839.500	58%	64.761.030	
8.	PERHUBUNGAN	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar,	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas (IK : Indeks Kualitas	IKUH (Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Tersele nggaran ya Lalu Lintas dan Angkutan			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Perhubungan

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Urusan Perhubungan/IKUH)		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jalan (LLAJ)								
							Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia		3.000 Unit	51.28 6.500	2.027 Unit	51.23 5.600	

Sekretariat TKPK
Kabupaten Sikka

No.	Urusan Pemerintahan /Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2022		2022		
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Kabupaten /Kota							
9.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19	Meningkatnya Perekonomian Sektor (IK : Kontribusi Sektor)	PDRB	PENGEMBANGAN UMKM	Terseleksi Pengembangan UMKM			Wilayah Kabupaten Sikka					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan dan Pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta design dan teknologi		1.000 Orang	640.550.000	1.000 Orang	640.550.000	

Dari Tabel 3.1, diketahui bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, sebesar Rp193.186.582.786, terealisasi sebesar Rp147.189.425.793. Terdapat 11 program dan 36 sub kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sikka dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:

1. Program pengelolaan pendidikan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penambahan ruang kelas baru;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah;
 - 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
 - 4) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah;
 - 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
 - 7) Pengelolaan dana BOS sekolah dasar;
 - 8) Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama;
 - 9) Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan.
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis;
 - 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;

- 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 14) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - 15) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.
3. Program pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
 - 2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
 - 3) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
 4. Program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, dengan sub kegiatan :
 - 1) Perbaiki RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
 5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.
 6. Program perlindungan dan jaminan sosial, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
 7. Program penanganan kerawanan pangan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 8. Program pendaftaran penduduk, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
 9. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - 2) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 10. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), dengan sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
11. Program pengembangan UMKM, dengan sub kegiatan :
- 1) Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan dan pemasaran, SDM, serta design dan teknologi.

Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Analisis belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap belanja program regular, dikaitkan dengan prioritas masalah kemiskinan yang dihadapi. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

➤ **Program Penyelamatan**

Program penyelamatan masyarakat miskin dari kondisi kemiskinan melalui program-program antara lain:

- Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- Penanganan kerawanan pangan.

➤ **Program Perlindungan**

Program perlindungan masyarakat miskin dari kondisi kemiskinan melalui program-program antara lain:

- Pengelolaan pendidikan;
- Pengelolaan sumber daya air (SDA);
- Perumahan dan kawasan pemukiman kumuh;
- Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- Perlindungan dan jaminan sosial;
- Pendaftaran penduduk;
- Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

➤ **Program Pemberdayaan**

Program pemberdayaan masyarakat miskin dari kondisi kemiskinan melalui program Pengembangan UMKM



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2023**

BAB IV



RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Secara operasional penanganan permasalahan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi yang melibatkan intervensi lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multi pihak untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan guna menjamin efisiensi dan efektivitas implementasi penanggulangan kemiskinan.

Dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya penanggulangan kemiskinan terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan melalui (1) meningkatkan kualitas data dan informasi; (2) mensinergikan peran penanggulangan kemiskinan oleh multi stakeholder; menetapkan intervensi program/kegiatan yang tepat sesuai kondisi kelompok masyarakat miskin.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka adalah:

- a. Meningkatkan kualitas data base kemiskinan, melalui
 - ✚ Pemutakhiran data oleh Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan)
 - ✚ Mengakomodir kelompok masyarakat miskin yang belum terdata
- b. Mendorong adanya satu data base kemiskinan (single data) yang menjadi acuan bagi multi pihak dalam implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Melakukan pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin
Hasil pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin sangat penting untuk menetapkan intervensi program penanggulangan kemiskinan sesuai

dengan kondisi kelompok masyarakat miskin. Pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat memberikan data dan informasi kelompok masyarakat miskin yang dalam upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan.

- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan.
- f. Merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sesuai kondisi kelompok masyarakat miskin.
- g. Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- h. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan pengaduan masyarakat.





**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2023**

BAB V



PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan**
- 5.2. Rekomendasi**

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2.220 jiwa, pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2022 telah berupaya optimal melakukan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBDesa se-Kabupaten Sikka.

5.2 REKOMENDASI

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius yang perlu ditangani secara terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan, oleh karena itu yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah :

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan sebagai dokumen yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dokumen tahunan maupun lima tahunan.
2. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas database kemiskinan melalui pemutakhiran data oleh Perangkat Daerah dan BPS.



**SEKRETARIAT TKPKD
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2023**